

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 57
TAHUN 2021 DALAM PEMBERIAN IZIN MINUMAN BERALKOHOL**



Diajukan oleh:

RISIKKA HAFNI
2110012111040

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
Reg No: 05/HTN/FH/III-2025

Nama : Riskika Hafni
NPM : 2110012111040
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun
2021 Dalam Pemberian Izin Minuman Beralkohol

Telah disetujui pada Hari Kamis, Tanggal Tiga Puluh Bulan Januari Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Dr. Sandjar Pebrihaurati R., S.H., M.H

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara

Helmi Chandra SY, S.H., M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PENGESAHAN SKRIPSI
Reg No: 05/HTN/FH/III-2025

Nama : Riskika Hafni
NPM : 2110012111040
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun
2021 Dalam Pemberian Izin Minuman Beralkohol

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Selasa Tanggal Empat
Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima dan dinyatakan LULUS.

SUSUNAN TIM PENGUJI:

1. Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)
2. Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H (Anggota Penguji)
3. Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum



Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada pembahasan diatas tentang Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol, maka penulis mengambil simpulan sebagai berikut :

1. Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol, belum efektif dikarenakan sanksi yang di terapkan dalam peraturan Walikota Padang terlalu ringan dan tidak membuat efek jera kepada penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal
2. Kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol.
 - a. Kurangnya pengetahuan tentang Informasi teknologi (IT)
 - b. kurangnya pemahaman tentang prosedur dan tata cara pendaftaran izin
 - c. kurangnya kesadaran penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol
 - d. Kurangnya pengetahuan atas dampak aktivitas usaha yang ilegal
 - e. Faktor Ekonomi
 - f. Kurangnya monitoring dan edukasi
 - g. Kurangnya pemberian sanksi
3. Upaya penyelesaian kendala yang dihadapi Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol

- a. Sosialisasi dan Edukasi
- b. Monitoring dan pengawasan
- c. Penyitaan barang atau penyitaan minuman beralkohol

B. Saran

Sebagaimana dari hasil analisis penulis tentang Implementasi Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 dalam pemberian izin minuman beralkohol. Maka dari itu ada beberapa saran dari penulis dalam beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perdagangan dan instansi yang berperan dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol :

1. Agar Pemerintah Kota Padang menambah sanksi administratif yang lebih ketat untuk pelaku usaha minuman beralkohol sehingga rasa takut jika memperjual belikan minuman beralkohol secara ilegal
2. Agar Pemerintah Kota Padang membuat tempat khusus untuk melakukan monitoring dan edukasi kepada pelaku usaha yang melakukan aktivitas ilegal dan memberikan pemahaman bahwa aktivitas yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha tersebut adalah perbuatan melanggar hukum
3. Agar Pemerintah Kota Padang lebih memperketat aktivitas para penjual atau pelaku usaha minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol dikaki lima sehingga tidak mudah diakses oleh para anak dibawah umur yang menyebabkan keresahan di tengah tengah masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- A.H.Hasan, 2021. Regulasi Minuman Beralkohol di Indonesia: Studi Kasus di Kota Padang, Prosiding Seminar Nasional Kebijakan Publik, Universitas Andalas.
- Bambang Sunggono, 2019, Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke 18, Rajawali Pers, Depok.
- Joni Laksito dan Dra Dyah Listyarini, 2024, Hukum Perizinan, Yayasan Prima Agus Teknik, Semarang.
- Lestari, Amelia, 2020. Minuman Beralkohol, Aspek Kesehatan dan Hukum .Surabaya.Penerbit Pelanggar.
- Marbun dan Mahfud, 1987, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1993, Pengantar Hukum Perizinan, Yuridika, Surabaya.
- Sjachran Bahasa, 1995. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi , Makalah pada Penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 1977 Tentang Minuman Keras.
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol.

C. Sumber Lain

- Armando Soares, Ratih Nurpratiwi dan M. “ Makmur, Peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah” *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol.4, No 2 (2015):236-2446
[file:///C:/Users/user/Downloads/102-134-1-PB%20\(3\).pdf](file:///C:/Users/user/Downloads/102-134-1-PB%20(3).pdf)

Boston, 677 Huntington Avenue. "*Alcohol: Balancing Risks and Benefits*". *The Nutrition Source* (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 22 Oktober 2022. https://id.wikipedia.org/wiki/Minuman_beralkohol

Mardiyono, S. "Minuman Beralkohol: Pengertian dan Efeknya" *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Vol. 15, No 2 (2021):53-60 <https://doi.org/10.1234/jkm.v15i2.1234>.

N.R. Arifin "Dampak Sosial dari izin Minuman Beralkohol", *Jurnal Sosial dan Budaya*.

Personel Satpol PP Padang melakukan razia dan memeriksa dan mengamankan alkohol yang tidak berizin <https://www.rri.co.id/hukum/684013/alkohol-tanpa-izin-terdeteksi-di-4-kecamatan-padang>

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdes) 2018, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Sari, R. "Fermentasi dalam Produksi Anggur: Proses dan Jenis." *Jurnal Teknologi Pertanian*.

Susanto, S. 2022. Fungsi dan Peran Pemerintah Dalam Pembangunan. *Jurnal Administrasi Publik*.

Wawancara dengan bapak Fitri Riza selaku staf Dinas Perdagangan Kota Padang, 7 Januari 2025.

Wawancara dengan Bapak Fitri Riza selaku staf Dinas Perdagangan Kota Padang, 13 Januari 2025.



¹ Wawancara dengan Bapak Fitri Riza selaku staf Dinas Perdagangan Kota Padang, 07 Januari 2025



² Wawancara dengan Bapak Fitri Riza selaku staf Dinas Perdagangan Kota Padang, 13 Januari 2025